LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN AGUSTUS DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Senin, 8 September 2025

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 68,17 %

b. Keuangan = 11.723.182.185 (61,29%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.213.000			2.626.000		
1	Konsultasi keterpaduan pusat dan daerah	7.853.000	49,10	24,85	1.926.000	(24,25)	Konsultasi Keterpaduan Pusat dan Daerah dilaksanakan untuk berkoordinasi terkait keterpaduan program prioritas dan target antara pusat dan daerah, juga untuk pemenuhan undangan pemerintah pusat secara luring, adanya efisiensi koordinasi pusat dan daerah lebih banyak dilakukan dengan daring.
2	Rapat Koordinasi Urusan PPPA dan Dalduk KB	10.360.000	100	6,76	700.000	(93,24)	target RKO perubahan telah diubah menjadi bulan Desember
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.610.728.000			7.780.010.204		

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.610.728.000	71,66	69,76	7.780.010.204	(1,90)	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.990.000			14.314.000		
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.990.000	84,74	71,60	14.314.000	(13,14)	Menyesuaikan kebutuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.200.000			8.131.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	36.200.000	58,54	24,04	8.131.000	(34,50)	Menyesuaikan kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.960.000			0		
1	Pelaksanaan fumigasi	9.960.000	100	0	0	(100)	Pelaksanaan kegiatan menunggu anggaran perubahan karena ada penambahan volume pekerjaan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	129.590.000			59.938.348		
1	Persiapan Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak	1.263.000	88,11	64,37	813.000	(23,74)	belanja persiapan menunggu anggaran perubahan
2	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Data Gender dan Anak	128.327.000	59,76	51,01	59.125.348	(8,75)	pelaksanaan kegiatan menunggu anggaran perubahan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	5.470.000			715.000		
1	Konsultasi PUG	5.470.000	36,56	13,07	715.000	(23,49)	Perjalanan dinas menyesuaikan kebutuhan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	279.956.000			91.015.000		
1	Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	279.956.000	44,19	32,78	91.015.000	(11,41)	kegiatan Gapuro Gayeng dialihkan untuk kegiatan lain yaitu Pesantren Perempuan dan Anak di anggaran perubahan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	31.026.000			13.302.500		

1	Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Keluarga Kabupaten/Kota	14.000.000	63,57	37,69	5.275.000	(25,88)	Kegiatan Sosialisasi TPK2D telah dilaksanakan di Semarang. Seharusnya ada belanja honor narasumber dan UH Peserta, namun tidak terealisasi karena narasumber berhalangan hadir dan peserta hanya mengundang OPD sehingga tidak memberi UH Peserta.
2	Layanan Edukasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Penjangkauan Penguatan Keluarga	17.026.000	60,69	50,16	8.027.500	(10,53)	terdapat belanja honor narsum untuk ngopi penak namun pelaksanaan kegiatan ditunda
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	2.050.000			0		
1	Pelaksanaan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Bagi AMPK	2.050.000	100	0	0	(100)	pelaksanaan kegiatan dilaksanakan untuk penguatan antar lembaga di TW IV
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	113.065.000			64.649.920		
1	Safari Pelayanan KB MKJP	113.065.000	63,76	58,16	64.649.920	(5,60)	Digunakan untuk SSK Baru pada anggaran perubahan
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	95.844.000			47.285.576		
1	Pengembangan Konten Media KIE	95.844.000	65,60	48,13	47.285.576	(17,47)	Karena masih ada anggaran gaji 1 orang Non ASN a.n. Aji Nugroho yang sudah diterima PPPK
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPT Perlindungan Perempuan danÂ Anak							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.961.000			4.414.700		
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6.961.000	63,88	63,43	4.414.700	(0,45)	
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	16	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

1. Juknis untuk pemantauan dan evaluasi stunting dari pusat belum terbit (KIE);
2. Hasil Survey SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) baru rilis di bulan Juni dan masih ada 6 kab/kota yang datanya masih kosong (KIE).
3. Penyusunan RAD KLA masih dalam proses penyelesaian batang tubuh (berisi pasal-pasal) dan lampiran pembagian tugas OPD terkait (PA)

Upaya

1. Koordinasi dengan TPPS Pusat, Provinsi dan kab/kota terkait juknis dan hasil survey SSGI (KIE).
2. Koordinasi intens dengan Tim Penyusun RAD KLA (PA)

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. ToT Fasilitator RPPA Kab/Kota (PP);
2. Fasilitasi Pembentukan RPPA di Kecamatan 35 kab/kota (PP);
3. Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KtP dan TPPO di Kota Semarang (PP);
4. Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Pelatihan Ekonomi Destara) (PP);
5. Dikpol rencana di 6 titik (KG);
6. Ngopi Penak (KG);
7. Rakor Pokja PUG Provinsi (KG);
8. Rakor Pokja Kab/Kota (KG);
9. Pelatihan Kader PATBM di Desdam (PA);
10. Â Workshop Pencegahan dan Penanganan Anak yang memerlukan perlindungan khusus (PA);
11. Rakor Pencegahan KTA (PA);
12. Rakor KLA (PHA);
13. Rakor TPPS di kab/kota (KIE);
14. Penggerakan KB Pria bersama MItra di Banyumas (KIE);
15. Safari Pelayanan KB MKJP rencana di 3 lokasi (KB);
16. Advokasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kab. Banjarnegara dan Kab. Pekalongan (Dalduk);
17. Sosialisasi kegiatan tribina dan uppka dalam upaya penurunan angka stunting di jawa tengah di Kota Surakarta (KS);
18. Bimbingan teknis peningkatan kualitas produk dan jaringan usaha kelompok uppka di Kab. Blora (KS)

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;
7. Semua kegiatan diarahkan untuk mendukung program prioritas Gubernur baru

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Agustus 2025, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Senin, 8 September 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Dra.. EMA RACHMAWATI, M.Hum

NIP. 196605171990082001